

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yasmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- D., Mukti Fajar N., dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- F., Lamintang P.A., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun, M. Husein, 1991, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hutabarat, Rainy Maryke dan Siti Aminah Tardi (eds.), 2022, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo, 2017, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.

Sari, Dwi Ayu Kartika, Rainy Maryke Hutabarat, Siti Aminah Tardi (eds.), 2021, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Komnas Perempuan, Jakarta.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Soekanto, Soerjono, 1986, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R., 1974, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Tridewiyanti, Kunthi, Ninik Rahayu, Ema Mukarramah (eds.), 2014, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010- 2013*, Komnas Perempuan, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal, Tesis, Makalah

Afrialdo, Masrizal, 2016, "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2.

Akbari, Anugerah Rizki (ed), 2022, Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 – 2020), Indonesia Judicial Research Society, Jakarta.

Akni, Krisna Tihar Fauzita, 2020, "Pembatalan Surat Dakwaan (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Arief, Barda Nawawi "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Makalah disampaikan dalam *Seminar Kriminologi Vi*, Semarang, 16 – 18 September 1991.

Christian, Juan Ivander, "Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Sebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan di Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 3 No. 2, 2018.

Eddyono, Sri Wiyanti dan Fatkhurozi, 2021, "Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban: Pentingnya Pengaturan Hukum yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Kertas Kebijakan RUU TPKS – YLBH APIK Jakarta*.

Erwin, Olivia Oktari, 2017, "Kebijakan Formulasi Mengenai Illicit Enrichment Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur.

Helmi, Muhammad Ishar, "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2, Desember 2014.

Ilham, Maya Hildawati, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)",
Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3, 2019.

Lestari, Putri Rahayu, 2022, "Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Polres Pati", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), Semarang.

Maerani, Ira Alia "Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi", *Jurnal Hukum*, Vol. 31 No. 2 (2015).

Nurisman, Eko, 2022, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2.

Nurmalasari, Nadhila Cahya dan Waluyo, 2022, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1.

Parno, 2020, Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Disertasi*, Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin.

Rompas, Christian "Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya untuk Mempercepat Proses Pembuktian", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2, Februari 2016.

Rusyd, Ibnu, 2020, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Kota Padang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Siadari, H., Rochaeti, N., Baskoro, B. D., "Arti Penting Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016).

Wafiuddin, Mu'ammam, 2022, "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*", *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.

Wandayati, Dida Rachma, 2022, "Prospek Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Proses Penyidikan oleh Polri di Kabupaten Sleman", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yasin, Johan, 2009, "Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia", *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11 No. 2.

D. Internet

Anas, Anwar, "Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman", <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>.

Anggraini, Sabrina "Tonic Immobility, Alasan Korban Kekerasan Seksual Tak Sanggup Melawan", <https://skata.info/article/detail/1227/tonic-immobility-alasan-korban-kekerasan-seksual-tak-sanggup-melawan>.

Antaraneews, "Pendamping Korban Kekerasan Seksual Harus Berperspektif Hak Korban", <https://www.antaraneews.com/berita/3048673/pendamping-korban-kekerasan-seksual-harus-berperspektif-hak-korban>.

Asshiddiqie, Jimly, 2016, "Penegakan Hukum", <http://surl.li/dzshe>.

Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi", http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi, diakses 28 Januari 2023.

Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, "Penduduk", http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/701-penduduk, diakses 7 Februari 2023.

Bloktuban, "Begini Upaya Polri Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak", <https://bloktuban.com/2021/12/14/begini-upaya-polri-tangani-kekerasan-perempuan-dan-anak/>.

Budiarti, Arsa Ilmi, 2021, "Mempertanyakan Kesiapan Polisi Tangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia", <https://magdalene.co/story/bagaimana-polisi-tangani-kasus-kekerasan-seksual>.

Budiman, Aditya, "Unit PPA Jadi Direktorat di Mabes Polri, Kompolnas: Sangat Diperlukan", <https://nasional.tempo.co/read/1545849/unit-ppa-jadi-direktorat-di-mabes-polri-kompolnas-sangat-diperlukan>.

Chairunnisa, Ninis, 2018, “Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU PKS yang Lambat”, <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat>.

Green Network, “Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dengan Perspektif Korban”, <https://greennetwork.id/unggulan/mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dengan-perspektif-korban/>.

Hukumonline, “Pengertian Politik Hukum Pidana dan Tahap Penegakannya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-pidana-lt62565ec91601b?page=all>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id/kendala>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id/tantang>.

Kanwil Kemenkumham Maluku, 2021, “Lindungi Hak Perempuan, Kanwil Maluku Ikuti Workshop SPPT PKKTP”, <https://maluku.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3607-lindungi-hak-perempuan-kanwil-maluku-ikuti-workshop-sppt-pkkt>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Membantu Korban”, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/membantu-korban/>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)”, <https://polri.go.id/spkt#:~:text=SPKT%20bertugas%20memberikan%20pelayanan%20kepolisian,hukum%20dan%20peraturan%20yang%20berlaku>.

Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022)”,

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>.

Kongres Advokat Indonesia, “Mengetahui 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur dan Kultur”,
<https://www.kai.or.id/berita/20228/mengetahui-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html>.

Media SAPDA, “Kerjasama Antar Layanan Penting dalam Mekanisme Penanganan Kekerasan”,
<https://sapdajogja.org/2021/11/kerjasama-antar-layanan-diperlukan-dalam-mekanisme-penanganan-kekerasan/>.

MOU antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Munawaroh, Nafiatul, “Syarat dan Prosedur Melakukan Visum sebagai Alat Bukti”, *<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-visum-lt51b4b7977c299>*, dipublikasikan 12 Januari 2023.

Novianto, Resky, “Saran Mabes Polri untuk Pelapor Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, *https://kbr.id/nasional/01-2022/saran_mabes_polri_untuk_pelapor_kasus_kekerasan_terhadap_perempuan_dan_anak/107441.html.*

Nurtjahyo, Lidwina Inge, “Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?”, *<https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>.*

Pengadilan Negeri Manna, “Prosedur Perkara Pidana di Pengadilan Negeri”, *<https://www.pn-manna.go.id/prosedur-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri/>.*

Pengadilan Negeri Stabat, “Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Singkat”, *<https://www.pn-stabat.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-singkat.html>.*

Pengadilan Negeri Stabat, “Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat”, *<https://www.pn-stabat.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-cepat.html>.*

PN Wamena, “Contante Justitie (Speedy Trial)”, <http://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html>, dipublikasikan 28 Juni 2022.

Purnomo, Calista Aspasia “Perbedaan Laporan dan Aduan dalam Hukum Pidana”, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-laporan-dan-aduan-dalam-hukum-pidana/>.

Putra, Cokorda Yudistira M., “Kerja Sama Multipihak Dibutuhkan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/07/kerja-sama-multi-pihak-dibutuhkan-dalam-menangani-kasus-kekerasan-seksual>.

Rahayu, Lisy, “Subdit PPA Polri Jadi Direktorat, Komnas Perempuan Singgung Rekrutmen Polwan”, <https://news.detik.com/berita/d-5880445/subdit-ppa-polri-jadi-direktorat-komnas-perempuan-singgung-rekrutmen-polwan>.

Ramadhan, Gilang, “Komnas Perempuan: Hanya 30% Kasus Kekerasan Seksual Diproses Hukum”, <https://tirto.id/komnas-perempuan-hanya-30-kasus-kekerasan-seksual-diproses-hukum-gnCs>.

Riyanto, Agus, “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

Rukmana, Neti Istimewa 2022, “DP3AP2 DIY Catat Ada 654 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di DI Yogyakarta”, <https://jogja.tribunnews.com/2022/09/16/dp3ap2-diy-catat-ada-654-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-yogyakarta?page=all>.

Statistikian, “Purposive Sampling – Pengertian, Tujuan, Contoh, Langkah, Rumus”, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>.

Sultoni, Ahmad, 2021, “Bedah Materi PKPA: Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP”, <https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-penyelesaian-perkara-pidana-berdasarkan-kuhap>.

Tardi, Siti Aminah, Rainy M Hutabarat, Andy Yentriyani, 2022, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Hari Bhayangkara, 1 Juli 2022: Pentingnya Penguatan Kelembagaan Polri untuk Pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-bhayangkara-1-juli-2022>.

TBNews, “Mewujudkan Penyidik Polri Yang Profesional Dan Bermoral (Bag I)”,

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/01/18/mewujudkan-penyidik-polri-yang-profesional-dan-bermoral-bag-i/>.

Wajdi, Farid, “Tantangan dan Perbaikan Penegakan Hukum”, *<http://farid-wajdi.com/detailpost/tantangan-dan-perbaikan-penegakan-hukum>*.